

Pola Akomodasi Komunikasi antara Pembimbing dan Klien Beda Budaya di Balai Pemasyarakatan Kelas I Manokwari Guna Percepatan Reintegrasi

Marlien Lande^{1*}, Tuti Bahfiarti², Muh. Farid³

^{1,2,3} Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 10, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia

*Penulis korespondensi; e-mail: marlienlande22@gmail.com

Abstrak

Klien pemasyarakatan merupakan narapidana yang menjalani sisa masa pidananya di luar Lembaga Pemasyarakatan. Klien pemasyarakatan selama menjalani sisa masa pidana diawasi dan dibimbing oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas). Pengawasan dan pembimbingan dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan (PK Bapas) untuk memastikan klien dapat kembali ke masyarakat (reintegrasi) dan tidak lagi melakukan tindak pidana. Klien yang dibimbing tidak hanya dengan latar belakang budaya yang sama melainkan juga yang berbeda. Faktor bahasa yang digunakan PK dan klien saat berkomunikasi merupakan satu hal yang juga perlu diperhatikan dari pelaksanaan bimbingan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola akomodasi komunikasi antara pembimbing kemasyarakatan dan klien pemasyarakatan beda budaya di Balai Pemasyarakatan Kelas I Manokwari guna percepatan reintegrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif melalui pendekatan fenomenologi. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan pengamatan non-partisipan serta studi dokumentasi/kepastakaan untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembimbing kemasyarakatan dan klien melakukan akomodasi komunikasi pada saat berinteraksi agar informasi yang diterima jelas serta memperoleh hasil yang efektif untuk klien dapat kembali ke masyarakat.

Kata kunci: Akomodasi komunikasi; Bahasa; balai pemasyarakatan; reintegrasi.

Abstract

Probation and parole clients are convicts spending the rest of their sentence outside the Correctional Facilities. While spending the rest of their sentence, clients are supervised and guided by the Probation and Parole Office (Balai Pemasyarakatan/BAPAS). The Supervision and guidance are carried out by the Parole Officers (Pembimbing Kemasyarakatan/PK) of the Probation and Parole Office to ensure that clients can return to society (reintegration) and no longer commit crimes. Clients who are mentored are not only from the same cultural background but also from different ones. The language factor used by PK and clients when communicating is one matter that also must be considered from the implementation of the guidance. This study aims to identify patterns of communication accommodation between Parole Officers and probation and parole clients with different culture at Class I Probation and Parole Office of Manokwari in order to accelerate reintegration. The research method used is a qualitative method through a phenomenological approach. This study used interview techniques and non-participant observations and literature to collect data. The results of the study show that Parole Officers and clients with different cultures conduct language adjustments each other when personality guidance is carried out. Also, uncertainty reduced from the first meeting so that the interests of both could be achieved.

Keywords: Accommodation communication; reintegration; language; probation and parole office.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.

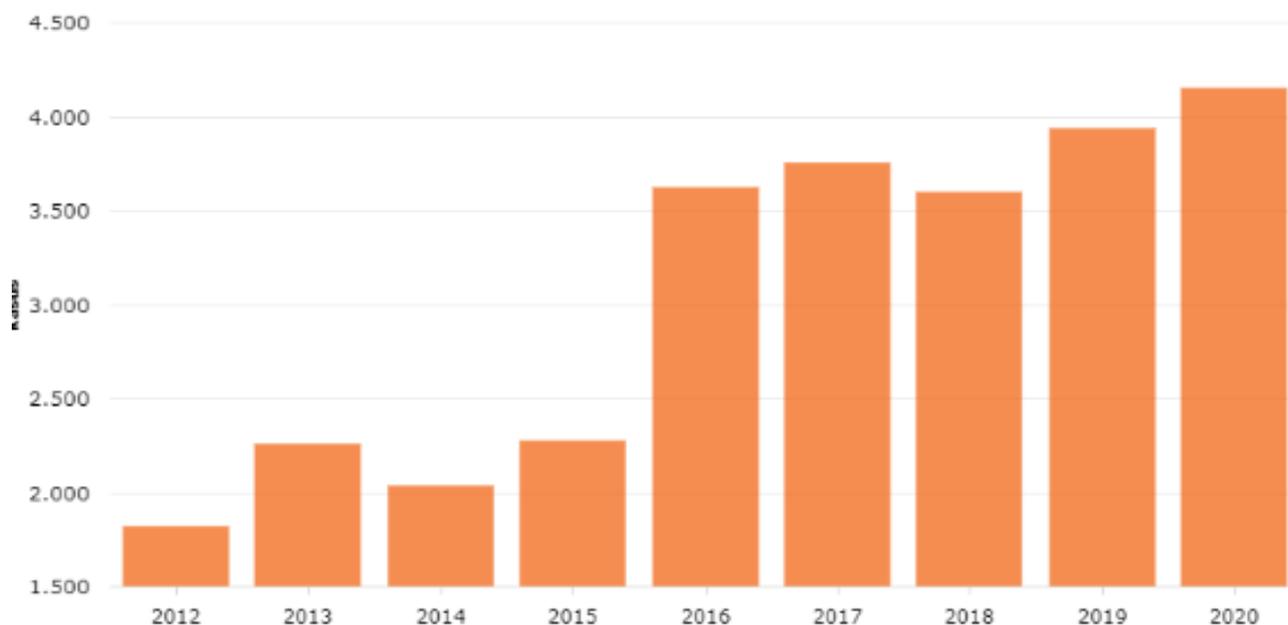


1. PENDAHULUAN

Manokwari merupakan ibukota Provinsi Irian Jaya Barat (sejak tahun 2007 disebut Papua Barat) merupakan provinsi pemekaran dari Provinsi Irian Jaya melalui Undang-Undang Nomor 45 tahun 1999. Pemekaran tersebut menjadi salah satu akses masuk bagi orang non papua untuk datang ke ibukota baru tersebut. Hal ini

sesuai dengan penelitian Suryawan (2016) yang menuliskan bahwa pembentukan Manokwari yang kembali dilaksanakan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2003 itu menjadikan manokwari mengakibatkan perubahan di bidang ekonomi, sosial serta budaya dan berimplikasi pada laju kedatangan orang non papua yang masif. Mobilisasi pendatang melalui alat transportasi darat dan udara berasal dari Jawa, Sulawesi, Maluku dan daerah lain di Indonesia.

Di sektor pemerintahan, pendirian dan peresmian gedung-gedung pusat pemerintahan menjadi salah satu alasan adanya mobilisasi tersebut. Selain karena alasan ditempatkan oleh unit kerja (pegawai instansi vertikal) namun juga menjadi alasan bagi para *fresh graduated* untuk mencari pekerjaan dengan harapan adanya menjadi pegawai pada instansi pemerintah daerah yang baru tersebut. Ditambah lagi dengan keberadaan para transmigran ke pelosok-pelosok daerah di Manokwari sehingga kehadiran pendatang di Manokwari secara tidak langsung menyajikan keberagaman suku, budaya, adat istiadat, kebiasaan sehari-hari, serta bahasa. Perubahan tersebut juga membawa dampak negatif berupa peningkatan angka kriminalitas di Papua Barat.

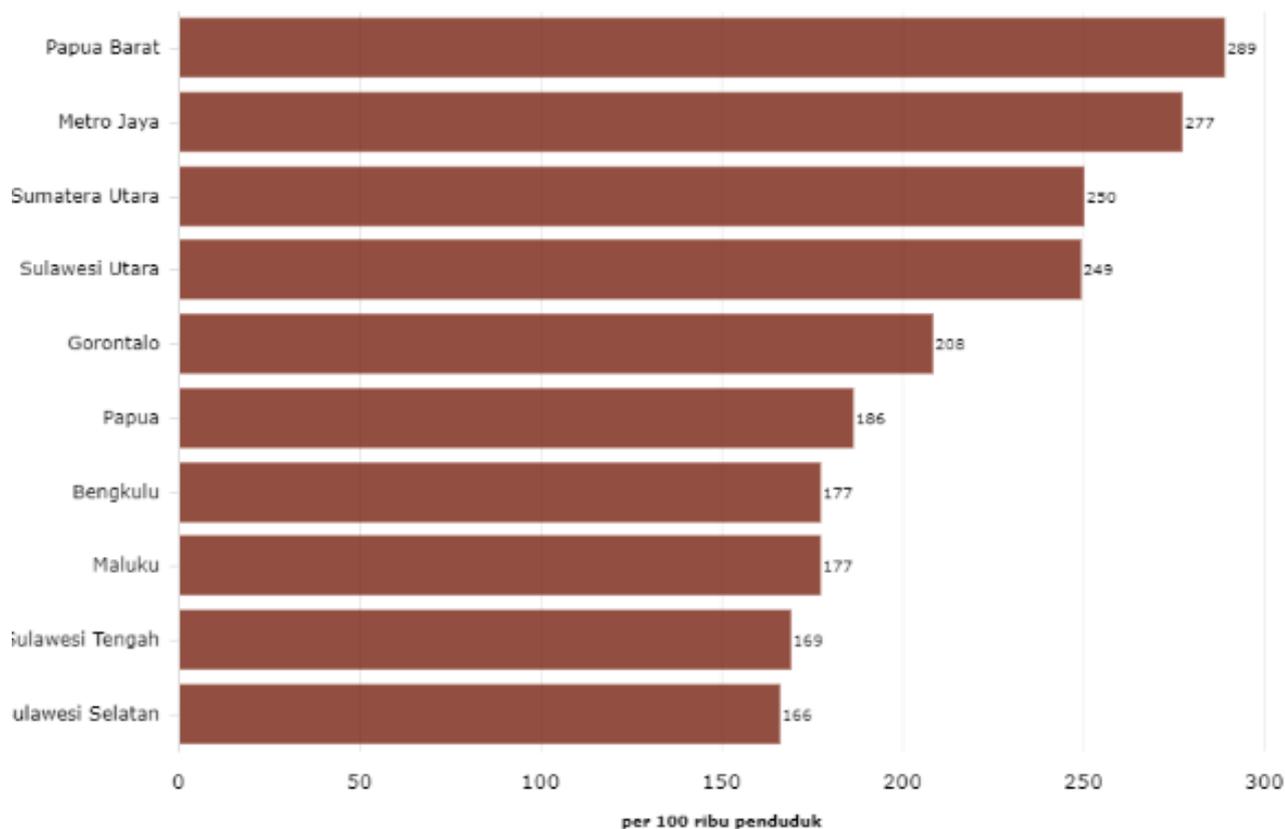


Gambar 1. Jumlah Kasus di Papua Barat Tahun 2012-2020 (Sumber:<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/15/tren-kasus-kejahatan-di-papua-barat-cenderung-meningkat-sejak-2012>)

Gambar 1 menunjukkan jumlah kasus kejahatan sejak tahun 2012 hingga 2020 cenderung meningkat. Media *online* jagapapua.com berdasarkan rilis resmi Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa tingkat kriminalitas Provinsi Papua Barat tahun 2020 berada pada urutan pertama se-Indonesia. Tahun 2021, katadata.co.id kembali menyebutkan bahwa Papua Barat masih menduduki peringkat pertama yakni sebanyak 289 kasus per 100.000 penduduk.

Banyaknya tingkat kriminalitas menandakan meningkatnya jumlah tahanan ataupun narapidana (warga binaan pemsayarakatan) Lembaga Pemsayarakatan dan Rutan di Papua Barat. Selama menjalani hukuman pidana yang diberikan, Pembimbing Kemasyarakatan akan melakukan penelitian kemasyarakatan (Litmas) untuk menilai warga binaan pemsayarakatan agar dapat memberikan penilaian terkait penempatan klasifikasi di Lapas, jenis pembinaan yang dapat diberikan, rekomendasi pemindahan hingga pemerolehan hak warga binaan.

Merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 35 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Revitalisasi Pemsayarakatan, disebutkan bahwa yang menjadi tujuan utama dari revitalisasi pemsayarakatan yakni merubah perilaku warga binaan pemsayarakatan dengan memberikan bimbingan ke arah yang lebih baik, memberikan pembinaan dan mempersiapkan warga binaan pemsayarakatan untuk dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat. Dengan kata lain, sistem pemsayarakatan berorientasi pada reintegrasi sosial yang menekankan pada upaya penyatuan kembali hidup, kehidupan dan penghidupan seorang warga binaan ke tengah-tengah masyarakat.



Gambar 2. 10 provinsi dengan Angka Kejahatan Tertinggi Tahun 2021 (Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/12/penduduk-di-provinsi-ini-paling-berisiko-menjadi-korban-tindak-pidana-pada-2021>)

Reintegrasi sosial sebagai tujuan akhir dari sistem pemasyarakatan dilakukan dengan memberikan hak warga binaan berupa pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Mengunjungi Keluarga sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan setelah mendapatkan haknya, selanjutnya dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang menjalankan tugas dan fungsinya di Balai Pemasyarakatan. Ketentuan umum UU 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Balai Pemasyarakatan (Bapas) adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembimbingan Kemasyarakatan terhadap Klien. Selanjutnya klien merupakan seseorang (dewasa maupun anak) yang ada dalam bimbingan pembimbing kemasyarakatan.

Balai Pemasyarakatan (Bapas) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI). Di Papua Barat, terdapat tiga Bapas yang berlokasi di Manokwari, Sorong dan Fakfak. Balai Pemasyarakatan Kelas I Manokwari (Bapas Manokwari) berkedudukan di ibukota Provinsi Papua Barat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-08.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Pembentukan Balai Pemasyarakatan Kelas I Manokwari. Wilayah kerja Bapas di Papua Barat pada Tabel 1.

Tabel 1. Wilayah Kerja Balai Pemasyarakatan di Papua Barat

Balai Pemasyarakatan	Wilayah Kerja
Kelas I Manokwari	Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Teluk Bintuni
Kelas II Sorong	Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Tambrauw
Kelas II Fakfak	Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana

Sumber: Olahan Peneliti 2022

Pembinaan dan pembimbingan di tiap Bapas dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan sesuai dengan wilayah kerjanya. Bimbingan klien pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan menjiwai tata peradilan pidana dan mengandung aspek penegakan hukum dalam rangka mencegah kejahatan. Bimbingan ditujukan untuk kepentingan integrasi klien dengan masyarakat.

Tabel 2. Jumlah Pembimbing Kemasyarakatan dan Klien Bapas di Wilayah Papua Barat Bulan September Tahun 2022

Nama UPT	Jumlah PK	Klien Dewasa				Jumlah Klien
		PB	CB	CMB	Asimilasi	
Bapas Kelas I Manokwari	12	145	2	-	42	189
Bapas Kelas II Sorong	9	79	5	-	101	185
Bapas Kelas II Fakfak	-	50	1	-	16	67
TOTAL	21	274	8	-	159	441

Sumber: Olahan peneliti 2022

Dari Tabel 2 dapat dilihat jumlah PK sangat minim untuk menangani klien yang ada di wilayah kerjanya. Sebagai contoh di Bapas Manokwari jumlah klien yang berada dalam pembinaan dan pembimbingan adalah sebanyak 189 klien sehingga tiap PK akan menangani 15 klien. Jumlah tersebut belum termasuk klien anak pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Manokwari. Merujuk paparan sebelumnya terkait Manokwari sebagai ibukota Provinsi dan jumlah klien yang ditangani tiap pembimbing kemasyarakatan, dapat diasumsikan bahwa klien yang dibina dan dibimbing berasal dari latar belakang budaya yang berbeda mengingat Manokwari merupakan ibukota provinsi sehingga beragam variasi Bahasa ditemui oleh PK sangat mungkin terjadi saat memberikan bimbingan. Sehingga dapat memberikan bimbingan yang baik dan efektif, Pembimbing Kemasyarakatan dalam UU No. 22 tahun 2022 disebutkan sebagai Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan Litmas, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Klien, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Pelaksanaan Pembimbingan Kemasyarakatan oleh PK dilakukan melalui pemberian bekal dalam meningkatkan kualitas mental dan spiritual, intelektual, keterampilan, dan kemandirian bagi Klien sehingga klien siap untuk berbaur kembali dengan masyarakat.

Firdaus (2019) menyebutkan bahwa pemberian dukungan dan tuntunan yang diberikan kepada klien diharapkan dapat mengembangkan kapasitas diri serta perilaku klien. Bimbingan kepribadian tersebut dilakukan pada saat penyuluhan atau konseling pada waktu pelaksanaan wajib lapor maupun *home visit* (kunjungan ke rumah/lingkungan klien). Komunikasi yang tercipta pada saat pelaksanaan bimbingan kepribadian tentu tidak dapat mengesampingkan perbedaan budaya yang dimiliki oleh pembimbing kemasyarakatan dan klien. Memperhatikan keterkaitan tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian terkait pola akomodasi komunikasi antara pembimbing kemasyarakatan dan klien beda budaya guna percepatan reintegrasi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Beberapa penelitian terdahulu terkait akomodasi komunikasi sudah dilakukan sebelumnya namun tidak membahas terkait akomodasi komunikasi antara Pembimbing Kemasyarakatan dan klien pemasyarakatan. Selain perbedaan informan, masih terdapat perbedaan-perbedaan lainnya, seperti yang terdapat dalam Jurnal Comunicoo dengan penulis Mas'amah tahun 2018 yang berjudul: Adaptasi Komunikasi Masyarakat Asal Pulau Jawa di Kota Kupang (Studi pada Wali Murid di SDN Angkasa Kota Kupang). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala yang dialami serta bagaimana mengatasi kendala yang ada dalam proses adaptasi orang Jawa di Kota Kupang. Konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah adaptasi komunikasi, bentuk hubungan antar etnik serta *uncertainty reduction theory*. Metode yang digunakan adalah metode fenomenologi dengan paradigma konstruktivis. Penelitian ini memperlihatkan bahwa tidak memahami bahasa lokal merupakan salah satu penyebab informan (orang Jawa) mengalami kendala dalam berkomunikasi. Namun, kendala tersebut diatasi oleh informan dengan aktif mengikuti kegiatan arisan dan pengajian. Hal yang membedakan dengan penelitian ini adalah subjek penelitian dan teori yang digunakan.

Selanjutnya penelitian berupa jurnal berjudul Akomodasi Komunikasi pada Mahasiswa Beda Budaya di Kota Kupang oleh Petrus Ana Andung, Ferly Tanggu Hana, dan Antonia Bara Benge Tani dalam Jurnal Manajemen Komunikasi: 2019. Penelitian ini menganalisis pengalaman akomodasi mahasiswa perantau (etnis Manggarai)

dengan mahasiswa tuan rumah (Kupang) di Universitas Nusa Cendana. Teori interaksi simbolik dengan metode fenomenologi digunakan oleh peneliti dalam menjelaskan hasil penelitian dan menggunakan teknik enam langkah menurut Cresswell. Dari hasil penelitian diketahui bahwa mahasiswa etnis manggarai melakukan akomodasi komunikasi dengan bentuk konvergensi untuk berinteraksi dengan mahasiswa tuan rumah. Disamping itu, ditemukan bahwa kontruksi pemaknaan dilakukan oleh mahasiswa etnis Manggarai (mahasiswa perantau) sebagai pembawa perubahan dan pejuang ilmu bagi masyarakat di Kampung halaman. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Petrus, dkk., penelitian ini menganalisis hasil penelitian dengan menggunakan komponen analisis data model Miles dan Huberman.

Jurnal penelitian lainnya berjudul Akomodasi Komunikasi Aparatur Sipil Negara Magang di Perusahaan Manufaktur oleh Irma Rachmawaty dan Effy Zalfiana Rusfian dalam Jurnal Komunikasi Global: 2021. Penelitian dilakukan untuk melihat akomodasi komunikasi yang dilakukan oleh peserta magang dan kendala yang dialami dalam proses akomodasi komunikasinya. Data yang dianalisis merujuk pada empat tahapan model Giles dan Anxiety Uncertainty Management (AUM) dengan pendekatan kualitatif interpretatif dengan metode studi kasus. Dari penelitian ditemukan bahwa peserta magang melakukan konvergensi, divergensi dan sedikit akomodasi berlebihan untuk menyesuaikan diri dengan pegawai perusahaan manufaktur tersebut. Hal pembeda yakni dalam penelitian ini, penulis menambahkan dua teori lain untuk menganalisis data primer yang telah diperoleh dari penelitian.

2.1 Teori Akomodasi Komunikasi (*Communication Accomodation Theory/CAT*)

Teori Akomodasi Komunikasi (*Communication Accomodation Theory/CAT*) digagas oleh Howard Giles pada tahun 1973. *CAT* berpijak pada premis ketika individu berinteraksi, mereka melakukan perubahan pada pola vokal, gerak tubuh dan ucapan mereka untuk mengakomodasi individu lainnya. Giles dkk mempercayai bahwa akomodasi tersebut atas beberapa alasan seperti: menghidupkan persetujuan pendengar, mendapatkan efisiensi dalam komunikasi, mempertegas posisi dominan, dan melindungi identitas sosial yang positif (West dan Turner: 2018).

Gallois dan Giles mengklasifikasikan tiga bentuk akomodasi komunikasi. *Pertama*, bentuk konvergensi (*convergence*). Konvergensi dimaknai sebagai adaptasi yang dilakukan dengan cara modifikasi sebagai bentuk akomodasi untuk mencapai komunikasi yang efisien. Giles dan Smith percaya bahwa ada faktor-faktor yang mempunyai ketertarikan untuk melakukan akomodasi antara lain: kemungkinan interaksi di masa mendatang, kemampuan berkomunikasi penutur, serta perbedaan status (West dan Turner: 2018).

Kedua, bentuk divergensi (*divergence*). Divergensi merupakan bentuk akomodasi yang digunakan untuk menonjolkan perbedaan baik verbal maupun non-verbal diantara para komunikator. Para komunikator tidak memiliki kemauan untuk saling mengakomodasi. Alasan divergensi bermacam-macam. Salah satunya bahwa seseorang ingin mempertegas identitas sosial yang dimilikinya. Divergensi merupakan satu cara bagi anggota komunitas untuk mempertahankan budaya sebagai identitas sosial. Hal tersebut oleh Giles dkk dinilai sebagai suatu strategi simbolis untuk mempertahankan identitas, menyatakan kebanggaan atas budaya dan menunjukkan keunikannya. Alasan lainnya berkaitan dengan kekuasaan dan peran yang berbeda dalam percakapan. Divergensi seperti ini tampak dalam percakapan antara dokter-pasien (Street dalam West dan Turner: 2018).

Bentuk akomodasi komunikasi yang *ketiga* adalah akomodasi berlebihan (*overaccommodation*). Bentuk akomodasi ini nampak ketika komunikator secara berlebihan mencoba untuk melakukan akomodasi pada saat merespon seseorang sehingga terkesan memberi ejekan meskipun komunikator berniat baik saat melakukan akomodasi. Mengingat satu dari tujuan komunikasi adalah untuk memperoleh kesamaan makna yang dimaksudkan, maka akomodasi berlebihan dianggap sebagai penghalang yang berpengaruh dalam mencapai tujuan dari komunikasi. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Zuengler (West dan Turner: 2018) yang menyatakan bahwa terdapat implikasi yang serius dalam akomodasi berlebihan seperti tidak memiliki motivasi untuk mengetahui bahasa lebih lanjut, menjauhi percakapan, serta menciptakan sikap negatif atas komunikator dan masyarakat.

2.2 Teori Bahasa (*Linguistic*)

Fachriyah Eva (dalam Jurnal Ilmu Komunikasi: 2022) menuliskan: “Gambaran budaya sebuah masyarakat dapat terlihat dari penggunaan bahasa masyarakat tersebut. Keadaan masyarakat pun dapat tergambar dari penggunaan bahasa. Sehingga bahasa dan budaya sangat erat berkaitan.” Semakin modern kehidupan suatu masyarakat, kita dapat melihat semakin kaya pula bahasanya. Tingkatan kelas atau status masyarakat itu pula dapat dilihat dari pemilihan bahasa yang digunakannya.

Terdapat tiga macam variasi bahasa yakni idiolek, dialek, dan ragam. Variasi bahasa yang sifatnya perorangan di mana setiap individu memiliki ciri khasnya sendiri disebut idiolek. Variasi berikutnya yakni dialek di mana variasi bahasa merupakan variasi bahasa yang dimiliki oleh sekelompok orang pada waktu dan tempat tertentu. Sedangkan ragam merupakan variasi bahasa yang penggunaannya dipakai berdasarkan situasi, keperluan dan keadaan tertentu yang dialami oleh penutur, apakah ragam baku atau tidak baku; formal atau tidak formal.

Manusia saling berkomunikasi menggunakan bahasa agar maksud dan tujuannya dapat dimengerti oleh pihak komunikan. Finocchairo mengatakan *language is a system of arbitrary vocal symbols which permits all people in given culture, or other people who have learned the system of that culture to communicate or to interact* (bahasa adalah satu sistem vokal arbitrer yang memungkinkan orang-orang dalam satu budaya atau orang lain yang telah mempelajari sistem budaya itu untuk berkomunikasi atau berinteraksi). Berdasarkan definisi Finocchairo, unsur-unsur utama bahasa ialah: lambang vokal (bunyi), arbitrer (suka-suka), serta komunikasi atau interaksi (Arnawa: 2008).

Selanjutnya Wardhaugh menjelaskan adanya hubungan antara lambang vokal dan arbitrer (1972), yakni *language is a system of arbitrary vocal symbols used for human communication* (bahasa adalah sebuah sistem simbol vokal yang arbitrer yang dipakai umat manusia berkomunikasi), ini bermakna bahwa bahasa merupakan hal yang terucap (berhubungan dengan verbal) dan mempunyai makna sesuai dengan kesepakatan pengguna bahasa. Misalkan: “gayung” dimaknai oleh masyarakat di wilayah Indonesia Barat sebagai alat yang digunakan untuk mengambil air saat mandi. Sementara itu, masyarakat di wilayah Indonesia tengah dan timur mengenal kata “timba”.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Balai Pemasarakatan Kelas I Manokwari yang beralamat di Jl. Anday Manokwari - Papua Barat dengan beberapa pertimbangan antara lain: satu-satunya Bapas Kelas I di wilayah Papua Barat dan berada di ibukota provinsi yang diyakini memiliki masalah yang lebih kompleks dibandingkan dengan kota/kabupaten lainnya.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif melalui pendekatan fenomenologi. Polkinghorne berpendapat bahwa suatu studi fenomenologi memberikan pemaknaan akan pengalaman keseharian terkait fenomena atau konsep (Haryono: 2020).

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, pengamatan non-partisipan, dan studi dokumentasi atau kepustakaan. Teknik wawancara terhadap para informan dilakukan untuk mendapatkan pemahaman dari para informan tentang topik yang sedang diteliti. Sebagai pengamat non-partisipan, peneliti menempatkan diri sebagai pendatang yang mengamati aktivitas maupun kegiatan dari objek yang diteliti secara langsung. Studi dokumentasi atau kepustakaan pada penelitian kualitatif meyakini adanya kebenaran fakta dan data dari dokumen yang tersedia berupa jurnal, dokumen publik dan resmi, serta situs *online* (Haryono: 2020). Sumber data dilakukan dengan mewawancarai informan yang ditentukan secara *purposive sampling* agar tujuan dari penelitian ini dapat dicapai. Informan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yakni: informan internal dan informan eksternal. Informan internal sebanyak tiga orang dengan beberapa kriteria antara lain: 1) pegawai dengan jabatan pembimbing kemasyarakatan Bapas Manokwari; 2) baru pertama kali ke papua; 3) memiliki pengalaman kerja selama minimal tiga tahun; 4) memiliki dialek jawa yang kental; dan 5) mempunyai latar belakang pendidikan Sarjana Psikologi.

Tabel 3. Profil informan internal

No	Nama	Banyak klien	Lama Kerja	Asal
1	Nisak	19	3 tahun	Jawa Timur
2	Anang	12	3 tahun	Jawa tengah
3	Panggih	20	3 tahun	Yogyakarta

Sumber: Olahan Peneliti 2022

Selanjutnya informan eksternal sebanyak dua belas orang dengan kriteria antara lain: 1) merupakan klien Bapas Manokwari; 2) klien Pembebasan Bersyarat dan Asimilasi; 3) aktif melakukan bimbingan; dan 4) beda budaya dengan PK.

Tabel 4. Profil informan internal

No.	Inisial	Jenis Kelamin	Umur (tahun)	Asal	Tindak Pidana	Layanan
1.	RK	Laki-laki	35	Sulawesi Selatan	Narkotika	Pembebasan Bersyarat
2.	AS	Laki-laki	26	Papua Barat	Perlindungan Anak	Pembebasan Bersyarat
3.	MS	Laki-laki	27	Papua Barat	Narkoba	Pembebasan Bersyarat
4.	RP	Laki-laki	37	Papua Barat	Perlindungan Anak	Pembebasan Bersyarat
5.	YLE	Laki-laki	32	Papua Barat	Penganiayaan	Pembebasan Bersyarat
6.	PI	Laki-laki	31	Papua Barat	Pencurian dengan kekerasan	Pembebasan Bersyarat
7.	YS	Laki-laki	24	Papua Barat	Perlindungan Anak	Pembebasan Bersyarat
8.	GD	Laki-laki	29	Papua Barat	Narkotika	Pembebasan Bersyarat
9.	HA	Laki-laki	35	Sumatera Selatan	Penipuan	Asimilasi
10.	YE	Laki-laki	26	Papua	Penjualan senjata api	Asimilasi
11.	AL	Laki-laki	22	Ambon	Penipuan	Asimilasi
12.	HT	Perempuan	34	Ambon	Penggelapan	Asimilasi

Sumber: Olahan Peneliti 2022

Data dari penelitian akan dianalisis menggunakan komponen analisis data model Miles dan Huberman dengan tiga tahapan. Tahap pertama yakni tahap reduksi data untuk mengeliminasi data yang tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Tahap penyajian data dilakukan secara naratif, tabel atau pun bagan yang tertata rapi dan runtut sehingga menyajikan informasi yang mudah untuk dipahami. Tahap akhir yakni penarikan kesimpulan atas hasil penelitian (Haryono: 2020).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Di lokasi penelitian, peneliti melakukan pengamatan non-partisipan atas komunikasi verbal yang terjadi pada saat bimbingan kepribadian kepada klien di Bapas Manokwari. Dalam pengamatan tersebut, diketahui bahwa bimbingan kepribadian yang diberikan umumnya dikenal sebagai wajib lapor yang harus dilakukan oleh klien sesuai dengan jadwal yang disampaikan oleh pembimbing kemasyarakatan. Bagaimana komunikasi pada proses bimbingan kepribadian tersebut dijabarkan sebagai berikut:

4.1. Pembimbing Kemasyarakatan (PK/Informan Internal)

Pembimbing Kemasyarakatan sebagai informan internal mengaku mengalami kesulitan untuk berkomunikasi dengan klien pada awal melaksanakan tugas. Sebagai pendatang yang selama hidupnya baru pertama kali berada di lingkungan baru, PK mengalami keterkejutan dan merasa asing dengan perbedaan bahasa (dialek/logat) yang digunakan oleh orang-orang di Manokwari dengan daerah asalnya. Penyesuaian yang dilakukan oleh PK tidak serta merta namun membutuhkan waktu. Masing-masing PK memerlukan waktu yang beragam. Anang mengaku mulai bisa menyesuaikan dialek papua setelah 6 bulan. Lama penyesuaian Nisak dan Panggih berbeda seperti diutarakan:

“Setengah tahun banyak istilah-istilah baru. Tahun-tahun pertama kita menyesuaikan cara komunikasi, cara bimbing klien, sekitar satu tahun baru mengerti.” (wawancara Nisak, 30 September 2022).

“Sampai sekarang sebenarnya masih penyesuaian bu. Saya kalau sama orang yg bahasa Indonesia logat papua, saya masih bisa mendalami tapi klo yang logat papua kental ya itu bu, butuh perjuangan klo saya sampai saat ini. Kadang ada yang saya nggak mengerti karena kadang terlalu cepat, kadang kalau ngomong hadap ke depan itu, dia ngomongnya pelan.” (wawancara Panggih, 07 Oktober 2022).

PK dalam tugasnya memberikan bimbingan diperhadapkan dengan sejumlah klien yang berasal dari bermacam-macam latar belakang kebudayaan. Nisak mengatakan bahwa klien yang dibimbingnya sebanyak Sembilan belas orang klien dewasa yang terdiri dari klien Asimilasi, PB, CB. Jumlah tersebut belum termasuk klien anak yang ada dalam proses diversifikasi. Klien dewasa berasal dari papua, jakarta, ambon, dan makassar. Sementara itu, Anang bahwa menyampaikan kliennya ada dua belas orang klien dari berbagai daerah seperti papua, jawa dan bugis/makassar dan buton. Panggih berujar bahwa klien yang dimilikinya sekitar dua puluh orang yang berasal dari papua, soppeng dan jawa. Menghadapi klien dengan keberagamannya budayanya, selain PK melakukan penyesuaian dengan menggunakan dialek papua, PK juga menggunakan bahasa Indonesia seperti yang diungkapkan ketiga PK:

“Menggunakan bahasa indonesia dan menjelaskannya dengan kata-kata sehari-hari yang dimengerti mereka. Kata-kata santai, nggak formal, jadi menjelaskan istilah yang sulit, menggunakan kata-kata yang bisa dimengerti mereka, disisipkan Bahasa yang dimengerti mereka.” (wawancara Nisak, 30 September 2022).

*“Saat berbicara saya menggunakan bahasa indonesia dengan menambahkan logat papua sekarang. Misal **ko** kerja dimana? **Bapa ade** bagaimana?”* (wawancara Anang, 07 Oktober 2022).

*“Kalau saya menyampaikan sesuatu informasi yang penting, saya pake bindo. Misalnya syarat wajib lapor ada 3, saya full pake bahasa indonesia. Biasanya untuk ngasi penjelasan atau ngasi contoh baru pake logat. Misalnya: **ko** tanggal besok **ko** tidak wajib lapor, **sa** beri **ko** surat peringatan, baru kalo 2 kali **tra** datang, **sa** beri **ko** surat peringatan lagi.”* (wawancara Panggih, 07 Oktober 2022).

PK juga melakukan penyesuaian kepada klien pendatang (bukan orang asli papua). Penyesuaian yang dilakukan tidak pada penyesuaian asal dari klien namun menggunakan dialek papua seperti yang diungkapkan dalam wawancara berikut:

“Kalau dengan klien pendatang, menggunakan logat (dialek) papua, misal dengan klien makassar pake logat papua karena saya nggak paham logat makassar, saya beranggapan kasusnya disini pasti mereka (klien pendatang) pasti sedikit banyak menggunakan logat papua juga jadi saya arahannya sesuai logat papua.” (wawancara Nisak, 30 September 2022).

“Kalau bahasa (dialek) makassar saya memang nggak ngerti kalau bahasa (dialek) papua masih pake bahasa indonesia jadi lebih bisa dimengerti.” (wawancara Anang, 07 Oktober 2022).

“Kalau klien bimbingan itu saya pakekan logatnya saya pakekan logat Papua biar mencairkan suasana. Walaupun bukan orang papua tapi kalau mereka sudah tinggal lama di Papua otomatis mereka pake logat jua kan.” (wawancara Panggih, 07 Oktober 2022).

Nisak menceritakan bahwa ia pernah bertemu dengan beberapa klien yang menyesuaikan bahasa seperti bahasa asalnya seperti *inggeh*, *maturnuwun*. Hal tersebut tidak diartikan oleh Nisak sebagai ejekan melainkan sebagai penghargaan dari klien sehingga Nisak tetap menerima penyesuaian tersebut. Hal yang sama juga diutarakan oleh Panggih:

“Biasanya maturnuwun, yang ucapkan orang Papua. Kalau saya berfikirnya itu usaha mereka untuk menghargai kita sih bu. Senang-senang saja.” (wawancara Panggih, 07 Oktober 2022).

Meskipun melakukan penyesuaian, mereka (PK) mengaku tidak dapat menghilangkan identitas budaya yang dimiliki dalam bentuk aksen daerahnya yang kental (*medok*) yang mereka gunakan dalam percakapan sehari-hari baik di lingkungan yang formal maupun non-formal. Anang menyatakan bahwa *medoknya* tidak dapat dirubah, demikian pula rekan-rekannya menyatakan bahwa sampai sekarang *medoknya* tetap digunakan selama berkomunikasi. Hal tersebut menurut pengakuan ketiga informan internal dikarenakan mereka tumbuh dan besar di Jawa dan baru pertama kali ke Papua.

*“Medoknya masih kalau logatnya yang sudah dibawa. Logatnya: **iya toh, su, ko, baru**, sudah mulai ikut papua jadi medoknya masih tapi logat papua jadi kombinasi.”* (wawancara Nisak, 30 September 2022).

*“Kita menggunakan logat sini seperti **su** makan ka? **ko** dari mana? Campuran bahasa sini.”* (wawancara Anang, 07 Oktober 2022).

*“Bisa merubah logat. Bisa saya rubah sih bu.. ada yang kata-katanya disingkat, ada yang intonasinya itu saya rubah juga. Saya kadang kalau ngomong pake logat papua, kalau saya lihat ada yang kata-katanya disingkat, ada yang intonasinya. Seperti: **ini jadi, enak baru**. kata-kata itu yang akhirnya saya pakai sehari-hari walaupun masih medok. Tetap pengaruh bu.”* (wawancara Panggih, 07 Oktober 2022).

Seperti yang diungkapkan oleh Anang:

“... kadang-kadang keceplosan juga bilang inggeh.” (wawancara Anang, 07 Oktober 2022).

Akomodasi yang dilakukan oleh PK ternyata memiliki alasan khususnya terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Selain untuk kelancaran program reintegrasi yang ditujukan bagi klien dapat berhasil dengan baik, alasan lain mengapa PK melakukan akomodasi dialek papua yakni:

“Tentu kalau komunikasi, dirubah-rubah sedikit ke Papua bu. Namanya kita mau ambil data, kita butuh keterbukaan dari mereka. Minimal kita sok kenal sok dekat. Lebih memungkinkan kita mengikuti mereka. Lama-lama kan kita sudah belajar.” (wawancara Panggih, 07 Oktober 2022).

“Supaya tidak disepelekan juga oleh klien. Walaupun tidak semuanya.” (wawancara Anang, 07 Oktober 2022).

4.1. Klien Pemasyarakatan (Klien/Informan Eksternal)

Selain informan internal, penelitian ini juga dilakukan kepada informan eksternal yakni Klien Pemasyarakatan. Sementara itu, salah satu klien yang berasal dari kota-kota di luar pulau papua (pendatang), sebagai informan eksternal melakukan akomodasi pada waktu proses wajib lapor (bimbingan kepribadian). Dari lokasi penelitian, peneliti bertemu dengan empat klien yang memiliki beda budaya dengan PK (pendatang Non Jawa) Pertama, RK, klien yang diwawancarai pada tanggal 07 Oktober 2022, merupakan seorang klien yang sudah tinggal di Manokwari sejak tahun 2010. Aksen bugis sudah tidak terlalu jelas saat berkomunikasi dengan pembimbing kemasyarakatan. Menurut pengakuannya, Ia menggunakan bahasa Indonesia dengan dialek papua seperti **“tarada, dong, dorang, sa”** saat proses wajib lapor (bimbingan). Begitu pula PK, menggunakan bahasa Indonesia serta menggunakan dialek papua. Meskipun demikian, aksen jawa tetap terdengar saat PK berbicara sehingga RK dapat menerka asal dari PK. Hal tersebut dikuatkan oleh penuturan informan eksternal kedua, HA, seorang klien asimilasi asal Palembang, Sumatera Selatan:

“...dia (PK) kan pakai bahasa Indonesia, memang masih pakai dialek jawa tapi masih bisa dimengerti. Lebih bagus, lebih enak kita dengarnya pake bahasa Indonesia lebih nyambung.” (wawancara dengan HA, 04 November 2022)

Namun, berbeda dengan dengan RK meskipun HA telah berdomisili di manokwari sejak Sembilan tahun yang lalu, aksen palembang masih dapat jelas terdengar. Selanjutnya AL dan HT yang keduanya merupakan klien asal Ambon juga lebih memilih untuk menggunakan bahasa indonesia untuk berkomunikasi dengan pembimbingnya:

“Lebih baik PK pake bahasa Indonesia karena lebih menghargai. Kalau tong pake tong punya bahasa agak kasar sedikit.” (wawancara dengan AL, 04 November 2022)

“Kalau PK mengikuti dialek saya, berarti adaptasi bu, menyesuaikan saja kalau memang begitu, tapi saya lebih cenderung (bapak) ke bahasa Indonesia karena status saya sebagai klien dengan PK.” (wawancara dengan HT, 04 November 2022)

Selain keempat klien pendatang di atas, peneliti juga mewawancarai delapan orang klien yang merupakan *“tuan rumah”* (klien orang asli papua/host). Beberapa klien lain mengatakan bahwa mereka menyesuaikan bahasa yang digunakan oleh PK dengan alasannya masing-masing.

“Pake bahasa Indonesia... fikir supaya jangan sampai bapak kurang paham.” (wawancara RP, 14 Oktober 2022).

“Tergantung pergaulan, kalo dengan teman-teman ya bahasanya sehari-hari, dialek papua, kalo dengan ibu PK pake bahasa indonesia.” (wawancara LE, 21 Oktober 2022).

“lebih enak bahasa indonesia karna komunikasi dengan orang itu lebih sopan kalau pake bahasa Indonesia daripada logat Papua.” (wawancara YE, 04 November 2022).

“menyesuaikan dengan PK supaya lebih bagus didengar, lebih menghargai. Kalau bicara dengan bapak tidak pernah pake logat papua.” (wawancara YS, 21 Oktober 2022).

Di sisi lain, ada pula klien yang tetap menggunakan dialek yang digunakannya sehari-hari. Klien orang asli papua sebagai *“tuan rumah”*, merasakan bahwa menggunakan dialek di tempat asalnya sendiri adalah hal nyaman dilakukan. Demikian disampaikan AS dan MS saat peneliti mewawancarainya. Aksen dan dialek yang digunakan begitu kental dalam wawancara yang dilakukan begitu juga pada saat bimbingan. Ketika ditanya,

MS menyatakan bahwa ia sangat nyaman berbicara dengan menggunakan dialek papua seperti yang disampaikan AS:

“sa nyaman pake logat Papua” (wawancara AS, 07 Oktober 2022).

Dalam suatu pengamatan, peneliti mengamati bagaimana PK menggunakan dialek papua pada saat bimbingan di mana klien (MS) tetap mempertahankan kebudayaan yang dimilikinya:

PK: MS tinggal di Arowi dengan ayah, ibu?

MS: Mama

(observasi tanggal 14 Oktober 2022)

Dari sepele tanya jawab di atas, terlihat bahwa PK bertanya menggunakan bahasa Indonesia dengan menggunakan kata ayah dan ibu sedangkan MS memutuskan untuk menjawab dengan menggunakan kata “mama”. Kenyamanan dirasakan MS saat menggunakan kata “mama” yang sehari-hari digunakan di Papua. Komunikasi dalam proses bimbingan memungkinkan timbulnya salah paham akibat perbedaan arti yang dimiliki individu dalam konteks beda budaya. Ini sesuai dengan penjelasan Wardhaugh yang menyebutkan bahwa ada keterkaitan antara unsur-unsur arbitrer dengan lambang bunyi (vokal). Pengalaman yang diceritakan oleh GD pada wajib lapor menjadi salah satu contohnya:

“Pekerjaan saya supir taksi, biasa saya ambil jalur taksi amban yang kampus itu. Kalau sekarang ini saya ada bawa hilux lagi lari Pegunungan Arfak. Bapak sempat tanya taksi apa karna pengertiannya bapak beda, tapi saya jelaskan ulang kalau taksi di sini itu angkutan umum.”

4.1. Pola Akomodasi Komunikasi antara Pembimbing Kemasyarakatan dan Klien Beda Budaya di Balai Pemasyarakatan Kelas I Manokwari

Akomodasi komunikasi pada dasarnya bersifat pilihan bagi para komunikator apakah dalam berinteraksi akan memilih untuk melakukan adaptasi komunikasi, salah satu tidak, atau tidak kedua-duanya. Ada kemungkinan individu melakukan penyesuaian secara sadar atau bisa jadi secara tidak sadar (West dan Turner: 2018). Penyesuaian dalam bimbingan kepribadian dilakukan agar tujuan dari komunikasi itu dapat tercapai dengan baik.

Penjabaran atas hasil penelitian menunjukkan bahwa para pembimbing melakukan akomodasi komunikasi saat kegiatan bimbingan kepribadian dilakukan. Pola akomodasi yang dilakukan berupa konvergensi yakni menyesuaikan dengan cara komunikasi lawan bicara. Cara komunikasi dalam hal ini yakni menyesuaikan dengan dialek yang digunakan seperti yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan. Mereka mencoba menjalin kedekatan dan mendapatkan informasi yang penting dari klien sehingga pembimbing dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Pembimbing berusaha melakukan pendekatan agar klien juga menjadi lebih terbuka atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pembimbing.

Kendati melakukan konvergensi, di saat bersamaan, PK juga melakukan divergensi atas ketidakmampuannya merubah/*shift* aksen yang dimilikinya. Ketidakmampuan ini bukan merupakan hal yang disengaja karena mengubah aksen merupakan hal yang nyaris mustahil untuk dilakukan khususnya bagi individu yang sejak kecil tidak pernah meninggalkan lingkungan asalnya. Kendati demikian, secara tidak sadar individu kembali menggunakan bahasa dan dialek yang telah dikenalnya sejak dini. Hal demikian (divergensi) juga dilakukan oleh beberapa klien di mana klien mengaku lebih nyaman menggunakan bahasa yang digunakan sehari-hari saat berbicara dengan pembimbing sehingga klien-klien tersebut tetap menggunakan bahasanya saat menerima bimbingan dari pembimbing kemasyarakatan.

Meskipun berniat baik, konvergensi yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan mendapatkan kesan atau tanggapan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pembimbing. Pembimbing berharap dapat menjalin kedekatan namun oleh beberapa klien, konvergensi tersebut tidak etis untuk dilakukan mengingat tempat di mana mereka melakukan bimbingan adalah tempat kerja sehingga menurut klien adalah lebih baik menggunakan bahasa Indonesia yang baik.

Selanjutnya merujuk pada teori bahasa, dalam dialek Papua terdapat penanggalan atau pemendekan kata serta perubahan kata yang mempunyai kesamaan arti dalam bahasa Indonesia. Berikut beberapa kata yang digunakan dalam dialek Papua:

Tabel 5. Bentuk Perubahan dalam Dialek Papua

Bentuk	Bahasa papua	Bahasa indonesia	Arti
Penanggalan	su	Sudah	sudah
	sa	Saya	saya
	nene	Nenek	nenek
	bapa	bapak/ayah	bapak/ayah
	tra	Tidak	tidak
	trada	tidak ada	tidak ada
Perubahan diftong	ko	kamu/anda	kamu/anda
Perbedaan istilah	bapa ade / mama ade	om/paman	adik orangtua
	bapa tua / mama tua	tante/bibi	kakak orangtua
	tete	kakek	kakek
	buang jaring	menebar jala	menebar jala untuk menangkap ikan
Perbedaan makna	taxi	angkutan umum untuk banyak orang	angkutan umum untuk pribadi
	lari	arah/jurusan/menju	dengan cepat menggunakan kaki secara bergantian
	pele	halang	menghalangi
kata/fonem	baru	-	-
tambahan yang tidak memiliki arti	e	-	-

Sumber: Olahan Peneliti 2022

Adanya prediksi-prediksi yang dimiliki PK bisa saja mengganggu profesionalisme PK dalam memberikan bimbingan. Ketidakpastian yang dirasakan PK tidak terbatas pada budaya tetapi juga terhadap latar belakang kasus yang dialami oleh klien. Oleh karena itu, meminimalisir bahkan mengurangi ketidakpastian adalah hal yang perlu dilakukan oleh PK yang dituntut bekerja secara profesional dengan berpegang pada kode etik pembimbing kemasyarakatan. Sebagai individu, PK memiliki ketidakpastian saat berhadapan dengan klien, namun kode etik yang diimban mengharuskan seorang PK untuk bertindak dan bersikap profesional. Seperti yang diuraikan oleh Ramadhan (2020) bahwa ada enam kode etik pemasyarakatan yakni memegang teguh rahasia terkait klien, menghormati klien sebagai insan, menerima klien dengan keberadaannya, mengikutsertakan klien dalam mencari solusi, menempatkan kepentingan klien di atas kepentingan pribadi, tidak membedakan perlakuan berdasarkan SARA dan status sosial klien.

5. KESIMPULAN

Balai Pemasyarakatan Kelas I Manokwari sebagai salah satu unit pelaksana teknis di bawah naungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Klien pemasyarakatan juga merupakan warga negara yang perlu diberikan haknya berupa mendapatkan bimbingan sehingga setelah keluar dari LAPAS, mereka boleh kembali berbaur dengan lingkungan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan tujuan sistem pemasyarakatan untuk memberikan pembimbingan kepada klien sehingga dapat kembali berbaur dengan masyarakat. Bimbingan yang dilakukan Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan diberikan kepada klien pemasyarakatan di wilayah kerjanya. Banyaknya klien memungkinkan pembimbing kemasyarakatan berinteraksi dengan klien dari beragam latar belakang budaya sehingga dalam bimbingan kepribadian yang dikenal dengan wajib lapor, pembimbing kemasyarakatan melakukan akomodasi komunikasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa PK melakukan penyesuaian dengan bentuk konvergensi dan divergensi. Konvergensi yang dilakukan oleh PK nampak saat mereka menggunakan dialek yang digunakan di Manokwari. Klien pendatang juga melakukan penyesuaian terhadap cara berbicara PK dengan maksud agar PK paham atas hal yang disampaikannya. Sedangkan divergensi yang tampak melalui aksen yang digunakan. Identitas budaya berupa aksen dimiliki bukan sebagai bentuk tembok penghalang dengan kliennya melainkan atas ketidakmampuan PK melakukan perubahan aksen. Ketidakmampuan tersebut ada karena PK sejak kecilnya sudah berada di lingkungan dengan aksen Jawa yang kental. Begitu pula dengan klien orang asli Papua yang tetap menggunakan dialek dan aksen Papua. Hal tersebut diakui sebagai bentuk kenyamanan dalam bimbingan wajib lapor yang dijalankannya. Bentuk penyesuaian berlebih dirasakan oleh klien ketika PK menggunakan dialek Papua yang dikombinasikan dengan aksen Jawanya sehingga hal ini menyebabkan klien lebih memilih PK tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.

Perbedaan dialek dapat menyebabkan ketidakpastian yang dialami PK dan klien. Oleh karena itu, ketidakpastian dihilangkan dengan PK berpegang kepada kode etik pembimbingan kemasyarakatan dan klien berdasar bahwa bimbingan yang diberikan semata-mata sebagai upaya menjadikan klien sebagai individu yang bermanfaat bukan hanya bagi diri sendiri melainkan lingkungan tempatnya tinggal dan terlebih bagi negara. Di masa mendatang diharapkan akan ada penelitian serupa yang akan meneliti tentang komunikasi non-verbal yang tampak dalam proses bimbingan. Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat diteliti lebih lanjut oleh cabang-cabang ilmu lainnya.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada seluruh informan yang terlibat juga kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia atas dukungan beasiswa yang diberikan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKIA

- Andung, P. A., Han, F. T., & BT, A. (2019). Akomodasi Komunikasi pada Mahasiswa Beda Budaya di Kota Kupang. *Jurnal Management Komunikasi*, *4*(1), 1-19.
- Arnawa, Nengah. 2008. Wawasan Linguistik dan Pengajaran Bahasa Bali: Pelawa Sari. (<http://repo.mahadewa.ac.id/id/eprint/260/1/Wawasan%20Linguistik%20dan%20Pengajaran%20Bahasa-min.pdf>) diakses 12 Maret 2023
- Firdaus, I. (2019). Peranan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Upaya Penanganan Overcrowded pada Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, *13*(3), 339-358.
- Haryono, C.G. 2020. *Ragam Penelitian Kualitatif Komunikasi*. Jawa Barat: CV. Jejak.
- Mas'amah, M. (2018). Adaptasi Komunikasi Masyarakat Asal Pulau Jawa di Kota Kupang. *Jurnal Communio: Jurnal Jurusan Ilmu Komunikasi*, *7*(2), 1217-1224. <https://doi.org/10.35508/jikom.v7i2.2040>
- Muliati, Shinta., (2020). Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Reintegrasi Sosial. *Jurnal Neo Societal*; **Vol.5**; No.3 (hal. 238-254)
- Nofianti, N., & Roem, E. R., (2021). Pengalaman Komunikasi Pembimbing Kemasyarakatan dengan Klien Pemasyarakatan dalam Proses Bimbingan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, *5*(3), 6373–6378. <https://doi.org/10.31004/jptam.v5i3.1951>
- Rachmawati, I., & Rusfian, E. Z. (2021). Akomodasi Komunikasi Aparatur Sipil Negara Magang di Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Komunikasi Global*, *10*(2), 312-330.
- Ramadhan, R.R., 2020. Optimalisasi Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pencegahan Resiko Residivis Terhadap Klien Pemasyarakatan (Studi Kasus di Balai Pemasyarakatan Kelas II Pekanbaru). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/download/31542/17427/66415>.
- Renggong, R., & Madiong, B. (2021). Pembimbing Kemasyarakatan dan Klien Anak <https://repository.unibos.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/845/PEMBIMBING%20KEMASYARAKATAN%20DAN%20KLIEN%20A%20NAK%20-%20SOEARDY%20%28Buku%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Suryawan, I. N. (2017). “Tak Cukup Bagi Kami untuk Meratap, Kami harus Berjuang”: Kemandirian Mama-Mama dalam Dinamika Pemekaran Daerah di Tanah Papua. *Umbara*, *1*(2). 150-162. <https://doi.org/10.24198/umbara.v1i2.10060>
- West, R. L. dan Turner, L. H., 2018. *Introducing Communication Theory-Analysis and Application*, Edisi 6. New York: Mc Graw Hill Education.
- Bahfiarti, Tuti. 2012. Buku Ajar Dasar-Dasar Teori Komunikasi, (Online), (<https://drive.google.com/file/d/1jxyDIYeepARLgd2zKI0MeLKgOYUFUVX/view>, diakses 14 Agustus 2022)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/15/tren-kasus-kejahatan-di-papua-barat-cenderung-meningkat-sejak-2012> (diakses 20 Maret 2023)
- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/12/penduduk-di-provinsi-ini-paling-berisiko-menjadi-korban-tindak-pidana-pada-2021> (diakses 20 Maret 2023)
- <https://www.jagapapua.com/article/detail/6890/tingkat-kriminalitas-papua-barat-tertinggi-nasional-selama-2020> (diakses 20 Maret 2023)
- <https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/LONTAR/article/view/4541/2077> (diakses 14 Agustus 2022)
- <https://www.pdfdrive.com/bahan-ajar-linguistik-d60245463.html> (diakses 14 Agustus 2022)